

RENJA TAHUN 2017

**DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA KOTAMOBAGU**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena atas Rahmat, Petunjuk dan Anugerah-Nya, maka Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu dapat terselesaikan.

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu tahun 2017 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu.

Dengan disusunnya Renja ini diharapkan pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpolo serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan Good Governance.

Akhirnya, semoga dengan tersusunnya Renja Tahun 2017 ini dapatlah dijadikan bahan perbandingan dan Evaluasi untuk membangun terus Kota Kotamobagu yang kita cintai.

**Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA KOTAMOBAGU**



**SYAHRUDIN.SP
PEMBINA TKT. I**

Nip. 19591231 198203 1 105

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
BAB I	
PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	32
3.3. Program dan Kegiatan	35
BAB IV	
PENUTUP	38
LAMPIRAN	40
1. Metrik Renstra Tahun 2014-2018	
2. Metrik Renja Tahun 2017	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam membangun daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD. Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renja SKPD juga merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu disusun dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD yang merupakan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baru, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD yang secara legalitas formal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Kerja SKPD.

Penyusunan Renja SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu Tahun 2018 mendasarkan pada perencanaan multi sektoral di tingkat nasional dan regional, antara lain :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Pangan dan Pertanian 2015-2019;

- b. Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian 2015-2019;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Provinsi Sulawesi Utara;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018;
- e. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019;
- g. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019;
- i. Rencana Strategis Dinas Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018;
- k. Hasil Kesepakatan dalam Rakornis Perencanaan Program/Kegiatan Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018.

Disamping itu, Renja SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan-KK Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan juga berbagai perundang-undangnya yakni **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.** Perundang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dimana pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab sesuai dengan peran dan sumberdaya yang dimilikinya. Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan, sedangkan masyarakat berperan menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi dan konsumen yang nantinya diharapkan dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi.

Dan, untuk lebih mempertajam perencanaan pembangunan Tahun 2018 dengan ***"Tema: Inovasi dan Kreatifitas"*** sebagaimana arahan kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018, maka SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu menitikberatkan dukungan kepada **5 (lima) fokus prioritas pembangunan yakni : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Peningkatan kualitas Ketahanan pangan, Peningkatan infrastruktur, Penanggulangan kemiskinan, Keadilan dan kesetaraan gender, dan Pelestarian lingkungan hidup** dalam rangka pencapaian **Misi ke-3 Pembangunan Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018**, yakni :

"Menjadikan kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan."

Upaya pembangunan sektor pertanian, perikanan budidaya, peternakan dan perkebunan di Kota Kotamobagu secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pemantapan ketahanan pangan maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain.

Lebih lanjut, dalam rangka membangun ekonomi di Kota Kotamobagu peran pembangunan sektor pertanian dan perikanan lebih strategis karena didukung oleh potensi sumberdaya alam yang cukup dan memiliki kaitan kuat dari hulu hingga hilir, serta memiliki peluang pasar yang cerah. Namun demikian peran strategis tersebut belum mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat petani. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan baik teknis, ekonomi dan sosial, serta kebijakan yang belum berpihak kepada pelaku usaha.

Sebagai daerah otonom, tantangan berat yang dihadapi adalah mewujudkan cita-cita masyarakat secara signifikan, untuk itu diharapkan dukungan dana dalam

mengimplementasikan program/kegiatan yang sedang dan yang akan datang, menuju daerah otonom yang semakin nyata dan bertanggungjawab sebagai konsekwensi logis menuju ***"Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya Menuju Masyarakat Sejahtera, Berbudaya,dan Berdaya Saing"***, sebagaimana Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2013 – 2018.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 64/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik.
 20. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Kotamobagu;
 22. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembantuan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lemabaran Daearah Kota Kotamobagu Nomor 133};
 23. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe B;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu Tahun 2018 adalah sebagai dokumen perencanaan yang melengkapi dokumen perencanaan SKPD dan APBD Kota Kotamobagu Tahun 2018, karena memuat sasaran dan kegiatan prioritas pembangunan di tahun 2018.

Mengingat ketersediaan sumberdaya yang terbatas, maka prioritas pembangunan Pertanian Dan Prikanan Kota Kotamobagu Tahun 2018, diarahkan untuk pencapaian sasaran-sasaran pembangunan secara makro. Sehubungan dengan hal tersebut, maka prioritas program/kegiatan disusun dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu;
2. Berorientasi hasil (*outcomes*) yang signifikan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Pertanian dan Perikanan Kota kotamobagu terutama sasaran terukur sehingga langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Realita lingkungan secara global.
4. Penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu Tahun 2018 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan.

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu Tahun 2018 yang merupakan penjabaran perencanaan tahun ke 5 (lima) dari Rencana Strategis yang sebelumnya merupakan Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018, bahwa Tahun 2014 adalah merupakan Tahun Tema Pembangunan "Kelembagaan dan Penataan".

Sedangkan untuk Tahun 2016 Tema Pembangunan adalah Tahun "INFRASTRUKTUR", dan Tahun 2017 merupakan tahun "INVESTASI BERKELANJUTAN" Untuk hal itu Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu mendorong pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi kepada pembangunan Iventasi yang berkelanjutan di sektor Pertanian dan Perikanan di Kota Kotamobagu.

Pagu pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Kotamobagu dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program/Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu yang kemudian menjadi Dinas Pertanian dan Perikanan dimana untuk Tahun 2016 jumlah APBD sebesar Rp.24.688.728.400,-.

Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2017 pagu Anggaran Dinas Pertanian, dan Perikanan, Menjadi Rp.10.082.076.980,- atau mengalami pengurangan sebesar Rp. 14.606.651.420,- atau 59,16%. Pelaksanaan program/kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Prikanan Kota Kotamobagu Tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :

A. APBD SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu T.A 2017

Anggaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp. 10.082.076.980,- (*sepuluh miliar delapan puluh dua juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*). Alokasi

anggaran tersebut untuk pelaksanaan 15 (lima belas) Program/52 (lima puluh dua) Kegiatan. Adapun Perubahan APBD mengalami penurunan sebesar Rp. 6.434.234.200,- atau 62,27% dengan Realisasi sebesar Rp. 6.279.051.608,- atau 97,58% tingkat capaian fisik Selanjutnya, secara rinci hasil pengukuran Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu yang diikuti dari masing-masing program sebagai berikut :

1. Daftar Alokasi dan Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun Anggaran 2017

NO	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :	973.821.975,-	947.356.864,-	97,28
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.804.000,-	6.804.000,-	100,00
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.	92.506.700,-	68.556.389,-	74,12
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	295.520.000,-	295.520.000,-	100,00
	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.	51.231.275,-	51.231.275,-	100,00
	5. Barang Cetak dan Penggandaan	18.275.000,-	16.117.100,-	88,19
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	1.800.000,-	1.786.300,-	99,24
	7. Penyediaan Makanan dan Minuman	12.945.000,-	12.930.000,-	99,88
	8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.	494.740.000,-	494.401.800,-	100,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :	348.854.600,-	347.257.319,-	99,54
	1. Pembangunan gedung kantor	191.995.000,-	191.991.950,- 1.500.000,-	100,00
	2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.500.000,-	22.000.000,- 123.015.369,-	100,00
	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	22.000.000,-		98,72
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	124.609.600,-	8.750.000,-	98,72
	5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	8.750.000,-		100,00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur :	20.920.000,-	20.230.000,-	99,70
	1. Pengadaan Pakaian kerja Lapangan	20.290.000,-	20.230.000,-	99,70
4.	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur :	43.070.700,-	43.070.700,-	100,00
	1. Study Banding pengolahan RPH	43.070.700,-	43.070.700,-	100,00

5.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani : 1. Peningkatan kemampuan lembaga petani	581.349.475,- 581.349.475,-	579.856.300,- 579.856.300,-	99,79 99,79
6.	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi Pertanian/perkebunan : 1. promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	105.438.600,- 105.438.600,-	104.958.700,- 104.958.700,-	99,54 99,54
7.	Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan : 1. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 2. Koordinasi statistik pertanian 3. Pembangunan jalan pertanian Desa Kopandakan I 4. Pembangunan Jalan pertanian Desa Poyowa Besar II 5. Pembangunan sarana dan prasarana bangunan air irigasi pertanian (DAK) 6. Sertifikasi produk pertanian/perkebunan 7. Pembangunan Lokasi pembenihan pertanian/perkebunan 8. Pemberantasan Hama dan penyakit perkebunan	2.096.546.500,- 484.759.425,- 226.777.000,- 171.491.000,- 158.404.000,- 223.237.000,- 16.500.000,- 769.595.575,- 45.777.500,-	2.076.921.800,- 479.731.425,- 216.577.000,- 170.069.350,- 158.257.150,- 222.087.600,- 16.500.000,- 768.867.575,- 44.831.700,-	99,06 98,96 95,50 99,17 99,91 99,49 100,00 99,91 97,93
8.	Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan : 1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 2. Koordinasi dan perumusan kebijakan penyuluh pertanian 3. Penyuluhan kepada Gapoktan 4. Pemberian penghargaan bagi pelaku pertanian berprestasi 5. Penyusunan progama penyuluhan	388.880.650,- 72.129.450,- 67.268.600,- 87.490.800,- 44.656.000,- 117.335.800,-	377.014.550,- 72.129.250,- 67.201.700,- 85.690.800,- 34.657.000,- 117.335.800,-	96,95 100,00 99,90 97,94 77,61 100,00
9.	Program pengembangan budidaya perikanan 1. Pengembangan bibit ikan unggul 2. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 3. Pengembangan system produksi pembudidayaan ikan hias 4. Rehabilitasi kolam pasar benih ikan Bungko	1.06.109.725,- 556.914.000,- 42.360.625,- 87.210.000,- 144.430.950,-	1.066.053.125,- 556.479.000,- 42.124.425,- 87.210.000,- 144.198.950,-	99,81 99,93 99,44 100,00 99,84

	5. Rehabilitas saluran Inlet dan Outlet serta bak filter air pasar benih ikan Bungko	33.756.950,-	33.592.950,-	99,51
	6. Penyuluhan pokdakan(kelompok pembudidaya ikan)	42.506.600,-	41.832.200,-	98,41
	7. Pembangunan Gedung pengolahan Pakan Ikan	65.460.000,-	65.127.000,-	99,49
	8. Pembangunan saluran pemasukan dan pembuangan Air pada BBI Mogolaing(utang TA 2016)	95.470.600,-	95.470.600,-	100,00
10.	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak :	136.457.400,-	136.457.400,-	100,00
	1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	136.457.400,-	136.457.400,-	100,00
11.	Program Peningkatan produksi hasil peternakan :	47.560.300,-	47.560.300,-	100,00
	1. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	13.595.300,-	13.965.000,-	100,00
	2. Penyusunan Database potensi peternakan	33.595.300,-	13.965.000,-	100,00
12.	Program Peningkatan pemasaran hasil peternakan :	473.382.000,-	471.843.000,-	99,67
	1. Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	0,-	0,-	0,00
	2. Penyediaan sarana dan prasarana	473.382.000,-	471.843.000,-	99,67
13.	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan :	60.758.550,-	60.471.550,-	99,53
	1. Pemasangan Terali di saluran pasar benih ikan Bungko	33.760.000,-	33.473.000,-	99,15
	2. Peningkatan ketrampilan pengolah Hasil perikanan	26.998.550,-	26.998.550,-	100,00
14.	Program peningkatan penerapan Teknologi perkebunan/pertanian :	0,-	0,-	0,00
	1. Penyuluhan teknik budidaya Tanaman padi sawah system jajar legowo	0,-	0,-	0,00
	2. Penyuluhan Teknik Budidaya tanaman jagung Sistem jajar legowo	0,-	0,-	0,00
	3. Demonstrasi cara pembuatan pupuk pelengkap cair dan decomposer	0,-	0,-	0,00
	4. Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	0,-	0,-	0,00

15.	Program peningkatan penerapan Teknologi peternakan :	0,-	0,-	0,00
	1. Penyuluhan penerapan Teknologi peternakan tepat guna	0,-	0,-	0,00
J u m l a h		6.344.234.200,-	6.279.051.608,-	98,97

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

a. Tugas dan fungsi

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu, Namun kemudian pada awal bulan September 2016 lalu nomenklatur Dinas Pertanian Kota Kotamobagu tersebut mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Kota Kotamobagu, maka Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu mempunyai tugas dan fungsi, yakni :

1. Tugas :

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Mempunyai tugas Membantu Walikota Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantu di Bidang Pertanian dan Perikanan.

2. Fungsi :

- a. Melaksanakan tugas ketatausahaan yang meliputi bidang penyusunan program, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
- b. Memberikan izin/rekomendasi di bidang pertanian dan Perikanan Darat.
- c. Melaksanakan inventarisasi di bidang pertanian dan Perikanan Darat.
- d. Melaksanakan penetapan dan pemanfaatan produksi di bidang pertanian dan Perikanan Darat.
- e. Melaksanakan pembinaan produksi di bidang pertanian dan Perikanan Darat.

- f. Melaksanakan pembinaan usaha sumberdaya dan pengawasan;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Kotamobagu terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas,
- 2. Sekretaris,
- 3. Bidang-Bidang,
- 4. Sub Bagian dan Sub Bidang,
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran organisasi Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Kotamobagu ke dalam bidang, sub bidang dan sub bagian adalah sebagai berikut :

- 1. Sekretariat, terdiri dari :
 - * Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - * Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 2. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 - * Seksi Pembenihan Perlindungan dan Produksi Perikanan Budidaya.
 - * Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Budidaya.
- 3. Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluh Pertanian terdiri dari :
 - * Seksi Penyuluhan.
 - * Seksi Lahan dan Irigasi.
 - * Seksi Sarana Prasarana Pertanian, Pupuk dan Pestisida.
- 4. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :
 - * Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
 - * Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
 - * Seksi Pengelolaan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

5. Bidang Peternakan terdiri dari :

- * Seksi Pembenihan, Pembibitan dan Produksi Peternakan.
- * Seksi Kesehatan Hewan.
- * Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

c. Sumber Daya Manusia/Ketenagaan

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan yang dikelola Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Kotamobagu, sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia yang tersedia.

Secara keseluruhan, jumlah pegawai Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Kotamobagu pada Tahun 2017. Honor sebanyak 103 orang termasuk penyuluh perikanan dengan rincian 66 orang dengan status PNS dan 37 orang berstatus Non PNS termasuk THL atau pegawai kontrak. Dari 103 orang PNS pada Dinas Pertanian dan Perikanan, Kota Kotamobagu, maka menurut golongan dan pangkat terdiri dari: Golongan IV 7 orang, Golongan III sebanyak 83 orang, Golongan II sebanyak 13 orang.

Kemudian, dari jumlah PNS sebanyak 66 orang, maka yang menduduki jabatan struktural adalah sebanyak 18 orang, dengan rincian sebagai berikut : Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 5 orang, Eselon IV sebanyak 13 orang.

Selanjutnya berdasarkan pada tingkat pendidikan, maka dari seluruh PNS Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu yang berjumlah 66 orang dapat dikomposisikan sebagai berikut : S-3 (Magister) 3 orang, S-1 (Sarjana) sebanyak 50 orang, dan SLTA sebanyak 13 orang.

d. Sarana dan Prasarana SKPD

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu hingga saat ini memiliki sarana prasarana sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	Ket
1	2	3	4
1	Bak Pemijahan	8 Buah	
2	Bak sortasi Benih	1 Unit	
3	Bak Pematangan gonad	3 Unit	

4	Kantor BBI	1 Unit	
5	Rumah Karyawan	6 Unit	
6	Gudang	3 Unit	
7	Pertamanan	3 Unit	
8	Pagar	15 Unit	
9	Pos Jaga dan Pos Penyuluhan	8 unit	
10	Bangunan BPP	4 Unit	
11	Garasi	1 Unit	
12	Gedung Pertemuan	2 Unit	
13	Bangunan Depo pemasaran ikan hidup	3 Unit	
14	Komputer Pc	11 Set	
15	Printer	28 Unit	
16	UPS	1 Unit	
17	Meja ½ Biro sdh termasuk pejabat Es.IV	81 Unit	
18	Meja Komputer	1 Unit	
19	Kursi Kerja Staf	31 Unit	
20	Kipas angin	1 Unit	
21	Parang	4 Unit	
22	Cangkul	14 Unit	
23	Sekop	11 Unit	
24	Handspray	4 Unit	
25	Pipa Paralon 4 Inci	2 Unit	
26	Aerator	29 Unit	
27	Alat Ukur Sanitasi	1 Unit	
28	Almari	17 Unit	
29	Almari 2 Pintu	3 Unit	
30	AmphyFire	1Unit	
31	Akuarium	14 Unit	
32	Botol Gelon air Aqua	2 Unit	
33	Pompa air	2 Unit	
34	Counter	17 Unit	
35	Dispenser	5 Buah	
36	Dvd	1 Unit	
37	Ember	16 Unit	
38	Ember Plastik Bertutup	10 Unit	
39	Faksimile	2 Unit	
40	Fish bush	40 Unit	
41	Fish Baskep	20 Unit	
42	Garpu	11 Unit	
43	Generator 10 KWA	2 Unit	
44	Generator 2,9 KVA	5 Unit	
45	Handycam	8 Unit	
46	Happa	(1x1x1) 83 Unit	
47	Happa	(2x1x1) 133 Unit	
48	Happa	(2x1x0.75) 8 Unit	
49	Happa	(2x4x0.75) 16 Unit	
50	Happa Pemijahan	(2x1x0.75) 20 Unit	
51	Happa Pematangan Gonad	(2x4x0.75) 23 Unit	
52	Hardisk	9 Unit	
53	Hi blow	3 Unit	
54	Horizontal blindf (32 m & 52 M)	2 unit	
55	Vertikal Blind	75m	
56	Kakaban	57 unit	
57	Kamera	22 unit	
58	Kantong Plastik	3 Unit	
59	Kendaraan Dinas Pick Up	2 Unit	

60	Kendaraan Dinas Roda 2	62 unit	
61	Kendaraan Roda 4 Nissan	1 unit	
62	Note book	45 Buah	
63	Kursi Direksi	3 Buah	
64	Kursi Kerja Hidrolik	15 Buah	
65	Kursi Kerja	10 Buah	
66	Kursi Kerja Pejabat	13 Buah	
67	Kursi Kerja Pejabat eselon 3	4 Buah	
68	Kursi Kerja Pejabat lain2	24 Buah	
69	Kursi Kerja Staf	14 Buah	
70	Kursi Kuliah	100 Buah	
71	Kursi Lipat	39 Buah	
72	Kursi Podium	6 Unit	
73	Kursi Sofa	6 Set	
74	Lemari arsip 2 pintu	1 Unit	
75	Lemari Besi	17 Unit	
76	Lemari dan arsip Pejabat lain	6 Unit	2010
77	Meja Kerja ½ Biro kerja pejabat eselon IV	12 Buah	
78	Meja Belajar Personal	1 Buah	
79	Meja Kerja 1 Biro	2 Buah	
80	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 Buah	
81	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	22 Buah	
82	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	12 Buah	2011
83	Meja Podium	1 Buah	2011
84	Meja Rapat	9 Buah	2011
85	Mesin Absensi	2 Unit	
86	Mesin Ketik	2 Unit	
87	Mesin Paras	1 Unit	
88	Mesin Pembabat / Pemotong Rumput	2 Unit	
89	Mesin Pencetak Pelet	2 Unit	
90	Mesin Pendingin (AC)	12 Unit	
91	Mesin Penggiling	1 Unit	
92	Mic Kabel	4 Unit	
93	Microfon meeting	4 Unit	
94	Mic Wireless	1 Unit	
95	Mistar 30 Cm	4 Buah	
96	Papan Informasi	3 Buah	
97	Papan tulis	2 Buah	
98	Whiteboard	4 Buah	
99	Pesawat telepon	3 Buah	
100	Proyektor	9 Buah	
101	Senter	10 Buah	
102	Selang	8 Buah	
103	Speaker	4 Buah	
104	Spray	1 Buah	
105	Tabung Oksigen	7 Buah	
106	Televisi	10 Buah	
107	Timbangan	24 Buah	
108	Tirai Pintu	2 Set	
109	Waring	65 Buah	
110	Tanah	1 Bidang	
111	Jaringan Irigasi Desa	8 Unit	
112	Jaringan Air Pasok	2 Unit	
113	Jaringan Jalan Komplek	2 Unit	
114	Jaringan Listrik	1 Unit	
115	Kolam	26 Unit	
116	Dam Penahan	10 Unit	

117	Saluran	4 Unit	
118	Sistem Penyadap Air	1 Unit	
119	Sumur Resapan	34 Unit	
120	Ikan Nila	85 Paket	
121	Ikan Mas	1073 Kilo	
122	Sput Otomat	2 Buah	
123	Termos Vaksin	5 Buah	
124	Kulkas	3 Buah	
125	Alat-alat Laboratorium	1 Set	
126	Mesin Penepung (Disk Mil)	3 Unit	
127	Meja Tulis	2 Unit	
128	Meja Biro	1 Unit	
129	PH Meter	3 Buah	
130	Kaca Pembesar	6 Buah	
131	Alat Hypopisasi	6 Buah	
132	Gelas Ukur	6 Buah	
133	Kotak Vibre Gas	1 Buah	
134	Rangkaian Pipa Galvanis	1 Buah	
135	Terpal	1 Buah	
136	Kios Saprotan	4 Unit	
137	Gazebo	6 Unit	
138	Induk Ikan Gurame	28 Paket	
139	Cool Box	25 Buah	
140	Tes Kin Formalin	1 Buah	
141	Oven Pengasapan	4 Unit	
142	Gun (alat Suntik)	1 Buah	
143	Container	3 Buah	
144	Termos IB	1 Buah	
145	Kursi Ruang Tamu	1 Set	
146	GPS	1 Unit	
147	Handytalky	8 Buah	
148	Filling Kabinet	8 Unit	
149	Rice Milling Unit	1 Unit	
150	Megaphone	5 Buah	
151	Brankas	1 Buah	
152	Meja Receptionist	1 Buah	
153	Kursi Size+Meja Bulat	1 Set	
154	Kursi Rapat	18 Buah	
155	Wirelles	6 Unit	
156	Rumah Produksi/Gilingan	1 Unit	
157	Kandang Jepit	4 Unit	
158	Gedung Sekretariat	1 Unit	
159	Rehab Pasar Ikan Tradisional	1 Unit	
160	Pematang Kolam	1 Unit	
161	Pemasangan Tegel dan Tangga pada Gedung Pengolahan PBI	1 Unit	
162	Jalan Usaha Tani	24 Paket	
163	Jalan Produksi	4 Paket	
164	Pagar BP3K	4 Paket	
165	Pagar Kantor	1 Paket	
166	Jaringan Air Bersih	1 Paket	
167	Jaringan Komputer+Perangkat Wifi	1 Set	
168	Perbaikan Pintu Air	1 Paket	
169	Calon Induk Ikan Patin	166 Kg	
170	Induk Ikan Mas	200 Kg	
171	PerencanaanJUT	1 Paket	
172	Perencanaan Pagar	1 Paket	

173	Pengawasan Konstruksi /Bangunan	2 Paket	
174	Perencanaan BBI Mogolaing	1 Paket	
175	Perencanaan PBI Bungko	1 Paket	
176	Perencanaan Gedung Sekretariat	1 Paket	
177	Perencanaan Bangunan/Gilingan	1 Paket	
178	Vertikal Blind dan Slim Blinde	1 Paket	
179	Hand Traktor	1 Unit	
180	Mesin Penggiling/Pencetak Pakan Ikan	4 Unit	

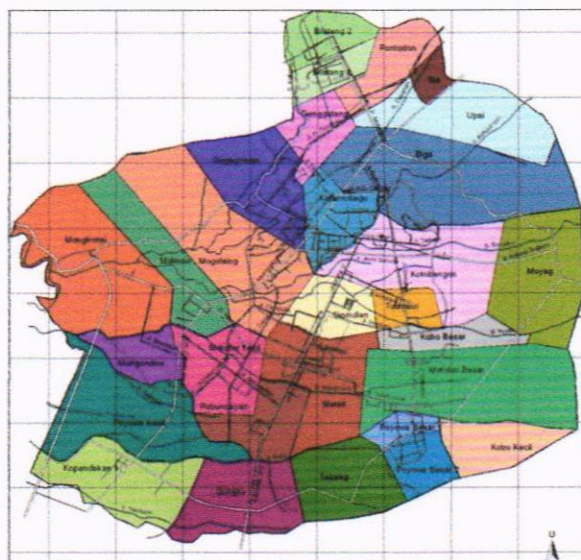
Sumber : Data Pengurus dan Penyimpan Barang Dinas DP4K Kota Kotamobagu Tahun 2014

Catatan : Beberapa Sarana dan Prasarana yang terlampir sudah tidak ada lagi dimana sebagian telah rusak dan adanya Pemisahan Bidang-bidang yaitu: Kehutanan dan Ketahanan Pangan.

e. Gambaran Umum Wilayah

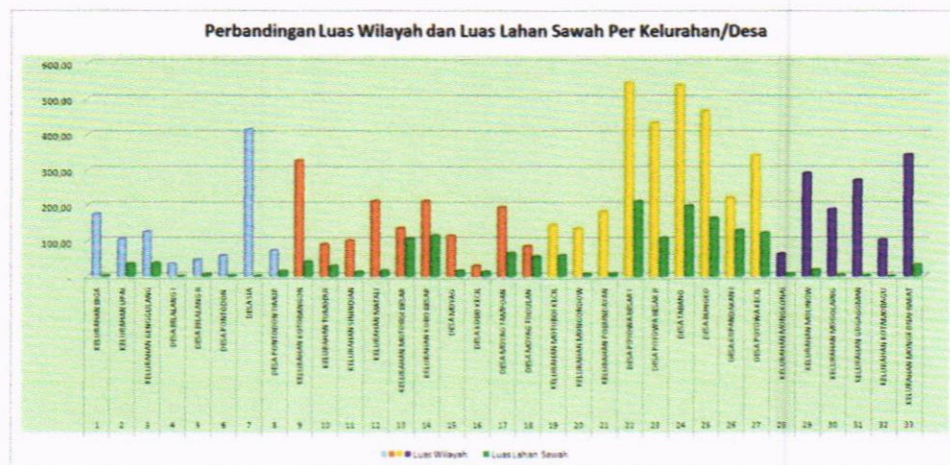
Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu, bahwa Kota Kotamobagu merupakan bagian integral dari Propinsi Sulawesi Utara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif, wilayah Kota Kotamobagu terbagi kedalam 4 wilayah kecamatan dan 33 desa/kelurahan dengan batas-batas wilayah :

- sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Passi Barat dan Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow
- sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow
- sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lolayan dan Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow



Gambar 2. Peta Kota kotamobagu

Kecamatan dengan jumlah terbanyak adalah Kecamatan Kotamobagu Timur yang terdiri dari 10 desa, sedangkan Kecamatan dengan jumlah Kelurahan terendah adalah Kecamatan Kotamobagu Barat yang hanya terdiri dari 6 Kelurahan/Desa. Pada tahun 2007 dilakukan pemekaran pada desa moyag menjadi 3 (tiga) desa yakni : desa moyag tompoan, moyag todulan dan moyag induk, sehingga Kecamatan Kotamobagu Timur yang sebelumnya terdiri dari 8 Kelurahan/Desa kini terdiri dari 10 Kelurahan/Desa.



Kota Kotamobagu didukung oleh sumber daya alam yang sangat potensial. Sektor tanaman pangan memegang peranan sangat penting disamping peternakan, perikanan darat, perkebunan dan hortikultura karena sangat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan masyarakat. Potensi yang dimiliki Kota Kotamobagu berpeluang untuk dikembangkan guna memperoleh *output* yang optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlebih khusus kesejahteraan petani.

Berdasarkan hasil Data Base Dinas P4KKP Kota Kotamobagu Tahun 2014 bahwa potensi lahan padi sawah di Kota Kotamobagu adalah sebesar 1.629,41 atau 23,96% dari Total Luas Wilayah Kota Kotamobagu.

Tabel 6. Perbandingan Luas Wilayah dan Luas Sawah Per Kelurahan/Desa di Kota Kotamobagu Tahun 2014.

No.	KECAMATAN/KELURAHAN/DESA	LUAS WILAYAH (HA)	LUAS LAHAN SAWAH	
			(HA)	(%)
1	2	3	4	5
KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT		1.258,25	60,86	4,84
1	KELURAHAN MONGKONAI	63,16	6,77	10,72
2	KELURAHAN MOLINOW	290,54	17,77	6,12
3	KELURAHAN MOGOLAING	188,87	2,93	1,55
4	KELURAHAN GOGAGOMAN	270,80	1,89	0,70
5	KELURAHAN KOTAMOBAGU	102,78	0,00	0,00
6	KELURAHAN MONGKONAI BARAT	342,10	31,5	9,21
KECAMATAN KOTAMOBAGU UTARA		1.036,20	93,00	8,98
1	KELURAHAN BIGA	175,77	1,42	0,81
2	KELURAHAN UPAI	104,94	34,88	33,24
3	KELURAHAN GENGULANG	126,06	36,61	29,04
4	DESA BILALANG I	35,36	0,00	0,00
5	DESA BILALANG II	47,10	3,91	8,30
6	DESA PONTODON	58,76	1,50	2,55
7	DESA SIA	414,54	0,00	0,00
8	DESA PONTODON TIMUR	73,67	14,68	19,93
KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR		1.500,26	468,03	31,20
1	KELURAHAN KOTOBANGON	326,07	40,48	12,41
2	KELURAHAN TUMOBUI	90,50	28,77	31,79
3	KELURAHAN SININDIAN	100,63	12,21	12,13
4	KELURAHAN MATALI	211,78	15,73	7,43
5	KELURAHAN MOTOBUI BESAR	135,96	106,35	78,22
6	KELURAHAN KOBO BESAR	211,91	115,37	54,44
7	DESA MOYAG	114,23	14,90	13,04
8	DESA KOBO KECIL	29,09	12,67	43,55
9	DESA MOYAG TAMPOAN	194,83	65,57	33,65
10	DESA MOYAG TODULAN	85,26	55,98	65,66
KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN		3.005,29	1.007,52	33,52
1	KELURAHAN MOTOBUI KECIL	145,07	58,56	40,37
2	KELURAHAN MONGONDOW	134,94	5,87	4,35
3	KELURAHAN POBUNDAYAN	182,56	7,57	4,15
4	DESA POYOWA BESAR I	544,37	211,49	38,85
5	DESA POYOWA BESAR II	433,03	108,33	25,02
6	DESA TABANG	538,70	198,85	36,91
7	DESA BUNGKO	465,79	164,32	35,28
8	DESA KOPANDAKAN I	220,83	129,47	58,63

9	DESA POYOWA KECIL	340,00	123,06	36,19
33	KOTA KOTAMOBAGU	6.800,00	1.629,41	23,96

f. Kependudukan

Dari tabel 7 dapat lihat bahwa penduduk yang paling banyak adalah kecamatan Kotamobagu Barat yakni 45.412 jiwa dan terendah adalah kecamatan Kotamobagu Utara yakni 18.131jiwa.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Kotamobagu sampai dengan per 31 Januari 2014

No.	KECAMATAN/ DESA – KELURAHAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (jiwa)
		LAKI-LAKI (jiwa)	PEREMPUAN (jiwa)	
1	KEC. KOTAMOBAGU UTARA	9.291	8.840	18.131
	1 KEL. BIGA	2.177	2.144	4.321
	2 KEL. UPAI	1.198	1.166	2.364
	3 KEL. GENGULANG	1.694	1.576	3.270
	4 DESA BILALANG I	1.253	1.162	2.415
	5 DESA BILALANG II	1.243	1.161	2.404
	6 DESA PONTODON	1.105	1.059	2.164
	7 DESA SIA	164	165	329
	8 DESA PONTODON TIMUR	457	407	864
2	KEC. KOTAMOBAGU TIMUR	16.337	15.388	31.725
	1 KEL. KOTOBANGON	4.026	3.818	7.844
	2 KEL. TUMOBUI	1.467	1.445	2.912
	3 KEL. SININDIAN	1.485	1.384	2.869
	4 KEL. MATALI	2.577	2.489	5.066
	5 KEL. MOTOBUI BESAR	1.386	1.337	2.723
	6 KEL. KOBO BESAR	843	785	1.628
	7 DESA MOYAG	1.275	1.169	2.444
	8 DESA KOBO KECIL	1.580	1.416	2.996
	9 DESA MOYAG TAMPOAN	797	750	1.547
	10 DESA MOYAG TODULAN	901	795	1.696
3	KEC. KOTAMOBAGU SELATAN	16.478	15.261	31.739
	1 KEL. MOTOBUI KECIL	2.727	2.562	5.289
	2 KEL. MONGONDOW	1.098	1.001	2.099
	3 KEL. POBUNDAYAN	2.979	2.856	5.835
	4 DESA POYOWA BESAR I	1.964	1.794	3.758
	5 DESA POYOWA BESAR II	1.269	1.234	2.503
	6 DESA TABANG	1.499	1.364	2.863
	7 DESA BUNGKO	766	722	1.488
	8 DESA KOPANDAKAN I	2.164	1.904	4.068
	9 DESA POYOWA KECIL	2.012	1.824	3.836
4	KEC. KOTAMOBAGU BARAT	23.203	22.209	45.412
	1 KEL.MONGKONAI	1.387	1.226	2.613
	2 KEL. MOLINOW	3.044	2.910	5.954
	3 KEL.MOGOLAING	4.886	4.678	9.564
	4 KEL.GOGAGOMAN	8.335	8.003	16.338
	5 KEL.KOTAMOBAGU	4.068	3.983	8.051
	6 KEL. MONGKONAI BARAT	1.483	1.409	2.892
5	33 KOTA KOTAMOBAGU	65.309	61.698	127.007

Sumber : Disdukcapil, 2014

Perbandingan Jumlah laki-laki dan perempuan penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan dengan selisih 3.611 jiwa. Jumlah penduduk ini dapat menjadi indikator yang dapat mempengaruhi terhadap tingginya kebutuhan akan pangan baik nabati maupun hewani.

g. Sosial Politik

Sebagai daerah hasil pemekaran penerapan tata pemerintahan yang baik bukanlah suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan. Berbagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik tercermin dari kemauan dan kesadaran untuk melakukan pengelolaan pemerintahan secara lebih efisien dan efektif. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintah daerah.

Penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen pemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating, dan controlling*) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem manajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, lingkungan instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Tata pemerintahan yang baik sangat terkait erat dengan kontribusi, pemberdayaan, dan keseimbangan peran antara tiga pilarnya (pemerintah, dunia usaha swasta, masyarakat). Walaupun demikian, penerapan nilai-nilai tata pemerintahan yang baik kenyataannya sering mengalami kendala yang pada umumnya didasari oleh kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas di kalangan pelaku khususnya sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Banyak pihak dari berbagai negara berupaya mengembangkan konsep tata pemerintahan yang baik untuk dunia usaha swasta (*good*

corporate governance) dan sektor publik (*good public governance*). Dunia usaha swasta dan masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menyuarakan pendapatnya serta mendapatkan kemudahan dalam mengakses segala bentuk informasi yang diperlukan. Pada akhirnya keduanya yang mengawasi kinerja pemerintah. Untuk mendorong proses keterlibatan dunia usaha swasta dan masyarakat, minimal ada tiga syarat yang diperlukan, yaitu : (1) adanya kesempatan; (2) adanya kemampuan; dan (3) adanya kemauan. Ketiga syarat tersebut, hanya dapat dipenuhi bilamana posisi dunia usaha swasta dan masyarakat setara.

h. Ekonomi

Peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan semakin tidak dominan, karena pemerintah lebih berperan sebagai regulator untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi keberlangsungan proses pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bangsa. Dengan berkurangnya peran pemerintah tersebut, dunia usaha swasta dan masyarakat memiliki peran yang sama untuk turut serta dalam setiap kegiatan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik. Dengan kata lain, ketiga pilar, yaitu, pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat memiliki peran yang seimbang.

Walaupun Kota Kotamobagu merupakan daerah baru tetapi infrastruktur perekonomian di daerah ini lebih baik dibandingkan daerah pemekaran yang lain, pusat perekonomian di daerah Bolaang Mongondow sebelum pemekaran sekarang ini terdapat di wilayah Kota kotamobagu antara lain Lembaga Pendidikan Pemerintah/ Swasta, Pusat Perbelanjaan (Pasar Tradisional dan Swalayan), Lembaga Perbankan, dan Lembaga swasta lainnya. Ini merupakan modal penting untuk penentuan arah kebijakan daerah demi tercapaiannya kesejahteraan rakyat.

Akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu Tahun 2017 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu selama tahun 2014 dan pencapaian target tahun 2015 dan 2018

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap terjadinya penurunan produktivitas beberapa komoditas pangan yakni adanya permasalahan yang disebabkan oleh :

- a. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global (*global climate change*);
- b. Infrastruktur irigasi banyak yang rusak sementara anggaran pemerintah kurang tersedia untuk ini
- c. Sistem perbenihan yang belum berjalan optimal;
- d. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan tingginya suku bunga usaha tani;
- e. Kualitas produk tanaman pangan yang dihasilkan petani belum sepenuhnya memenuhi standar;
- f. Masih rendahnya harga yang diterima petani, terutama pada masa panen raya, sehingga tidak mendorong petani untuk berproduksi;
- g. Persaingan pemanfaatan lahan dengan tanaman semusim lainnya;
- h. Penyusutan lahan sawah akibat alih fungsi lahan.
- i. Pengawasan dan pendampingan dan koordinasi di tingkat lapangan belum optimal.

Disamping itu juga terjadi berbagai permasalahan ditingkat petani, yakni :

- a. Pendidikan formal rendah.
- b. Rendahnya regenerasi petani.
- c. Usahatani kurang efisien.
- d. Teknologi terbatas.
- e. Luas pemilikan lahan petani sempit.

- f. Keterbatasan penguasaan teknik budidaya pada komoditas tertentu saja.
- g. Kurangnya orientasi agribisnis.
- h. Kurangnya penguasaan proses pengolahan pasca panen.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya program dan kegiatan, yakni :

- 1. Peningkatan Kesejahteraan Petani
- 2. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- 3. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- 4. Peningkatan Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan Lapangan
- 5. Pengembangan budidaya perikanan
- 6. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- 7. Peningkatan produksi hasil peternakan
- 8. Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- 9. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- 10. Peningkatan penerapan Teknologi perkebunan/pertanian
- 11. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- 12. Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu Tahun 2017 yakni terjadinya penurunan produktivitas beberapa komoditas yakni adanya permasalahan yang disebabkan oleh :

- a. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global (*global climate change*);
- b. Infrastruktur irigasi banyak yang rusak sementara anggaran pemerintah kurang tersedia untuk ini
- c. Sistem perbenihan yang belum berjalan optimal.
- d. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan tingginya suku bunga usaha tani;
- e. Kualitas produk tanaman pangan yang dihasilkan petani belum sepenuhnya memenuhi standar;

- f. Masih rendahnya harga yang diterima petani, terutama pada masa panen raya, sehingga tidak mendorong petani untuk berproduksi;
- g. Persaingan pemanfaatan lahan dengan tanaman semusim lainnya;
- h. Penyusutan lahan sawah akibat alih fungsi lahan.
- i. Pengawasan dan pendampingan dan koordinasi di tingkat lapangan belum optimal.

Tabel 11. Perbandingan antara Jumlah Petani dan Jumlah Penduduk di Kota Kotamobagu Tahun 2017

No.	KECAMATAN/ DESA - KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		PETANI	
		JUMLAH (jiwa)	KEPALA KELUARGA (KK)	JUMLAH (jiwa)	PROSENTASE (%)
1	KEC. KOTAMOBAGU UTARA	18.131	5.195	1.764	9,73
	1 KEL. BIGA	4.321	1.208	122	2,82
	2 KEL. UPAI	2.364	713	206	8,71
	3 KEL. GENGULANG	3.270	921	206	6,30
	4 DESA BILALANG I	2.415	692	455	18,84
	5 DESA BILALANG II	2.404	680	445	18,51
	6 DESA PONTODON	2.164	640	142	6,56
	7 DESA SIA	329	89	81	24,62
	8 DESA PONTODON TIMUR	864	252	107	12,38
2	KEC. KOTAMOBAGU TIMUR	31.725	9.211	3.771	11,89
	1 KEL. KOTOBANGON	7.844	2.233	229	2,92
	2 KEL. TUMOBUI	2.912	828	307	10,54
	3 KEL. SININDIAN	2.869	813	150	5,23
	4 KEL. MATALI	5.066	1.541	731	14,43
	5 KEL. MOTOBOSI BESAR	2.723	760	318	11,68
	6 KEL. KOBO BESAR	1.628	490	240	14,74
	7 DESA MOYAG	2.444	735	523	21,40
	8 DESA KOBO KECIL	2.996	860	689	23,00
	9 DESA MOYAG TAMPOAN	1.547	456	213	13,77
	10 DESA MOYAG TODULAN	1.696	495	371	21,88
3	KEC. KOTAMOBAGU SELATAN	31.739	9.215	4.435	13,97
	1 KEL. MOTOBOSI KECIL	5.289	1.567	880	16,64
	2 KEL. MONGONDOW	2.099	604	168	8,00
	3 KEL. POBUNDAYAN	5.835	1.612	569	9,75
	4 DESA POYOWA BESAR I	3.758	1.121	673	17,91
	5 DESA POYOWA BESAR II	2.503	774	469	18,74
	6 DESA TABANG	2.863	836	446	15,58
	7 DESA BUNGKO	1.488	436	212	14,25
	8 DESA KOPANDAKAN I	4.068	1.201	629	15,46
	9 DESA POYOWA KECIL	3.836	1.064	389	10,14
4	KEC. KOTAMOBAGU BARAT	45.412	12.596	1.720	3,79
	1 KEL. MONGKONAI	2.613	759	324	12,40
	2 KEL. MOLINOW	5.954	1.705	683	11,47
	3 KEL. MONGOLANG	9.564	2.642	112	1,17
	4 KEL. GOGAGOMAN	16.338	4.409	245	1,50
	5 KEL. KOTAMOBAGU	8.051	2.264	50	0,62
	6 KEL. MONGKONAI BARAT	2.892	817	306	10,58
5	33 KOTA KOTAMOBAGU	127.007	36.217	11.690	9,20

Disamping itu juga terjadi berbagai permasalahan ditingkat petani, yakni :

- a. Pendidikan formal rendah.
- b. Rendahnya regenerasi petani.
- c. Usahatani kurang efisien.
- d. Teknologi terbatas.
- e. Luas pemilikan lahan petani sempit.
- f. Keterbatasan penguasaan teknik budidaya pada komoditas tertentu saja.
- g. Kurangnya orientasi agribisnis.
- h. Kurangnya penguasaan proses pengolahan pasca panen.

Hal ini dapat disebabkan oleh produksi pada kelompok pangan tersebut masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya program dan kegiatan, yakni :

1. Optimalisasi Unit Perbenihan Rakyat (UPR) yang tersebar di 4 Kecamatan se-Kota Kotamobagu, Unit Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Pasar Benih Ikan (PBI) dalam upaya meningkatkan produksi sektor perikanan budidaya.
2. Peningkatan produksi (*onfarm/outfarm*) terhadap kelompok pangan seperti minyak dan lemak serta kelompok pangan kacang-kacangan.
3. Penumbuhan kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) agar berpedoman pada Permentan No. 273 Tahun 2007 dan dalam pengembangannya diarahkan kepada Lembaga Ekonomi Petani (Koperasi dan Badan Usaha Milik Petani);

Dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut yang perlu mendapat perhatian dan komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu, yakni:

- (1) Meningkatkan peran Pemerintah terhadap pencapaian target swasembada di daerah masing-masing melalui koordinasi program yang lebih baik dan dukungan dana APBD yang cukup.
- (2) BUMN/BUMD mengambil peran yang lebih besar lagi Termasuk mendukung permodalan.
- (3) Meningkatkan pemanfaatan teknologi melalui *upgrading* lembaga-lembaga riset yang ada termasuk di bidang bioteknologi pertanian produksi dan mempercepat laju diseminasi dan adopsi hasil-hasil riset tersebut di kalangan petani.

- (4) Menyusun dan melaksanakan program bersama yang komprehensif antara Pemerintah-Swasta untuk meningkatkan jumlah dan mutu SDM di daerah di bidang pertanian dan industri pendukungnya, mulai dari SDM Pemulia, Budidaya, Teknologi Pertanian, Teknologi Pangan hingga Kewirausahaan.
- (5) Menyusun dan melaksanakan program yang terpadu dan sistematis untuk meningkatkan kapasitas seluruh mata rantai industri pertanian mulai dari hulu hingga hilir, yang mencakup industri benih, pupuk, pakan, pestisida dan alsintan.
- (6) Melaksanakan sistem informasi produksi dan sistem informasi pasar secara efektif dan meningkatkan kualitasnya sehingga makin bermanfaat nyata bagi produsen maupun konsumen yang melaksanakan transaksi sehari-hari.
- (7) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif dengan menerapkan secara tegas ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (8) Melaksanakan sistem insentif yang pas dan *sustainable* untuk mendukung program-program intensifikasi dan ekstensifikasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Meskipun secara umum terjadi peningkatan dalam produksi, namun berbagai permasalahan harus diselesaikan dalam tahun 2017 terkait dengan upaya peningkatan Produksi Pertanian. Tantangan pembangunan Pertanian terutama terkait dengan aspek lahan, infrastruktur, penelitian dan pengembangan, investasi dan pembiayaan, serta adanya perubahan iklim.

Terkait dengan aspek lahan, pengembangan kawasan, dan tata ruang, ketersediaan dan kualitas sumberdaya alam (lahan dan air,) semakin menghadapi tekanan. Alih fungsi lahan pertanian produksi semakin menyempit, Pemanfaatan lahan kering masih terkendala oleh ketersediaan air irigasi. Sedangkan, pemanfaatan lahan terlantar masih belum dapat secara efektif dilakukan. Selain itu, permasalahan deforestasi, degradasi lahan, akan menyebabkan penurunan kualitas lahan dan penurunan dukungan ketersediaan air. Tata ruang harus terus diefektifkan sebagai bentuk nyata dukungan sumberdaya alam terhadap pemanfaatan dan perlindungan lahan pertanian guna mendukung hasil Prouksi.

Pembangunan sarana dan prasarana pertanian juga masih sangat diperlukan untuk mendukung pemanfaatan lahan kering dan lahan terlantar. Selain itu

jaringan irigasi yang ada masih belum berfungsi secara optimal sehingga memerlukan upaya peningkatan dan rehabilitasi. Keberpihakan pemerintah terhadap perbaikan sistem distribusi antar waktu dan antar wilayah (*connectivity*) sangat diperlukan. Cakupan penyuluhan serta kualitas penyuluh pertanian dan perikanan juga tetap akan menjadi tantangan berat pencapaian ketahanan pangan ke depan.

Beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan di Kota Kotamobagu adalah:

- a. Pangsa pasar ekspor produksi pertanian masih kecil, sementara produksi yang dimiliki cukup besar.
- b. Skala usaha tani kecil dan produksinya berfluktuasi.
Luas pemilikan lahan rata-rata relatif kecil (lebih kurang 0,30 Ha), akan mengakibatkan pengelolaan usaha tani tidak efisien dan akan berdampak pada produksi/produktivitas. Disamping itu dengan sifat produksi pertanian yang bersifat musiman akan mempengaruhi fluktuasi harga.
- c. Alih fungsi dan degradasi sumber daya alam dan air.
Sumber daya lahan dan air dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Demikian pula alih fungsi lahan sawah terus terjadi, sementara upaya perluasan areal tidak memungkinkan lagi, disamping itu debit air untuk irigasi juga berkurang.
- d. Penerapan teknologi di tingkat petani belum optimal.
Teknologi yang ada belum diaplikasikan secara optimal oleh petani, yang berdampak belum tercapainya tingkat produktivitas hasil sesuai dengan potensi yang ada. Beberapa faktor yang diperkirakan menghambat penerapan teknologi oleh petani adalah karena keterbatasan petani seperti permodalan, aksesibilitas terhadap sumber informasi keterampilan petani dan insentif harga yang diterima.
- e. Terbatasnya sarana / prasarana.
Dalam upaya penyediaan sarana produksi terutama benih dan bibit bermutu belum handal dan belum memiliki prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, mutu, waktu, jumlah, tempat, dan harga. Demikian pula halnya dengan Alsin (alat dan mesin) pertanian relatif masih terbatas.

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menyikapi kondisi obyektif dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks serta dalam upaya penyelesaian masalah yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat maka kebijakan khusus Tahun 2018 oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu adalah :

a. Perbaikan Infrastruktur Pertanian

Infrastruktur pertanian dipedesaan cukup banyak yang rusak yang menjadi salah satu penyebab tidak bisa terpenuhinya perluasan areal tanam karena kekurangan air. Upaya yang dilakukan adalah pembuatan jalan usaha tani, jalan produksi dan embung.

b. Menumbuh kembangkan Sentra Komoditas Andalan dan Unggulan yang berorientasi pasar dan sesuai dengan agro-ekosistemnya.

Komoditas andalan adalah suatu komoditas yang telah berkembang atau dikembangkan disuatu wilayah, yang menjadi tumpuan penghidupan/penghasilan utama bagi pendapatan petani diwilayah tersebut. Sedangkan komoditas unggulan adalah salah satu komoditas andalan yang menguntungkan untuk diusahakan/dikembangkan disuatu wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut komoditas yang dikembangkan di Kota Kotamobagu adalah :

1. Komoditas Tanaman Pangan : Padi, Jagung, Kedelai.
2. Komoditas Hortikultura : Mangga, Durian, Rambutan, Cabai
3. Komoditas Peternakan : Sapi, Ayam Buras, Itik dan Kambing.

d. Meningkatkan produktivitas dan diversifikasi pertanian.

Hal ini dilakukan karena di Kota Kotamobagu sudah tidak memungkinkan untuk perluasan lahan sawah, malah sebaliknya lahan sawah semakin berkurang dan dilain pihak debit air semakin mengecil. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi produksi pertanian dan peternakan adalah melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan SDM dan kelembagaan guna mendukung ketersediaan pangan.

e. Kegiatan pembangunan pertanian dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat, sedangkan pemerintah berperan dalam memfasilitasi, mendorong dan memberdayakan kemampuan dan kreativitas masyarakat.

- f. Untuk mewujudkan semua itu, kerjasama yang baik dari semua *stakeholders* yang terlibat dalam pembangunan pertanian, antara lain masyarakat, swasta, LSM, Legislatif, Pemerintah Daerah, Para Pakar dan Akademisi sangat diperlukan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan semakin tidak dominan, karena pemerintah lebih berperan sebagai regulator untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi keberlangsungan proses pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bangsa. Dengan berkurangnya peran pemerintah tersebut, dunia usaha swasta dan masyarakat memiliki peran yang sama untuk turut serta dalam setiap kegiatan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik. Dengan kata lain ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat memiliki peran yang seimbang.

Penyusunan Renja SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018 berdasarkan pada perencanaan multi sektoral di tingkat nasional dan regional, antara lain :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Pertanian dan Perikanan 2015-2019;
- b. Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian 2015-2019;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015–2019 Provinsi Sulawesi Utara;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018;
- e. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019;
- f. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2019;
- g. Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan se-Kota Kotamobagu, Forum SKPD Kota Kotamobagu dan Musrenbang Tingkat Kota Kotamobagu Tahun 2018;
- h. Hasil Kesepakatan dalam Rakornis Perencanaan Program/Kegiatan Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu (Renja

SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan dikerjakan secara fokus dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD yang secara legalitas formal.

Disamping itu, Renja SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan juga berbagai perundang-undanganyakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dimana pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab sesuai dengan peran dan sumberdaya yang dimilikinya. Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sedangkan masyarakat berperan menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi dan konsumen yang nantinya diharapkan dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi.

Dan, untuk lebih mempertajam perencanaan pembangunan Tahun 2018 dengan ***"Tema Pembangunan : Infrastruktur dan Utilitas"*** sebagaimana arahan kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018, yakni :

"Menjadikan kotamobagu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa serta mempertahankan keunikan kota kotamobagu sebagai kawasan pengembangan pertanian organik, penghasil beras dan kopi, meningkatkan kualitas dan fasilitas infrastruktur kota, mengembangkan

teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan."

Selanjutnya, Renja SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018 tentunya mengacu pada Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2014-2018, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu tahun 2014-2018, yakni :

" TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI INSTITUSI YANG HANDAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA"

Sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu tahun 2014-2018, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur di bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana Alat teknologi.

Tujuan merupakan suatu target kuantitatif dari suatu organisasi yang bersifat spesifik dan terukur. Selain itu tujuan dapat mendorong kinerja organisasi dan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja organisasi. Adapun tujuan pembangunan pertanian, dan perikanan di Kota Kotamobagu adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2. Peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur
3. Peningkatan pembinaan disiplin aparatur
4. Peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur
5. Peningkatan produksi pertanian dan perkebunan
6. Peningkatan produksi perikanan
7. Peningkatan produksi peternakan

Sedangkan Sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu adalah :

1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya disiplin aparatur

4. Meningkatnya produk pelayanan aparatur
5. Meningkatnya hasil produksi pertanian dan perkebunan
6. Meningkatnya hasil produksi perikanan
7. Meningkatnya hasil produksi peternakan

3.3. Program dan Kegiatan

Otonomisasi daerah telah melahirkan berbagai kebijakan yang nantinya diharapkan dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tuntutan *reformasi*.

Pembangunan sektor pertanian, perikanan budidaya, peternakan, perkebunan di Kota Kotamobagu secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Pembangunan pertanian, peternakan, perikanan budidaya, perkebunan merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, peternak ataupun pembudidaya yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian dan perikanan. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan dalam pencapaian peningkatan produksi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Untuk maksud tersebut di atas maka dalam rangka perencanaan program dan kegiatan diperlukan elemen pokok pendukung lain berupa indikator kerja sebagai parameter penilaian dari keberhasilan program dan kegiatan, kelompok sasaran merupakan objek dari program/kegiatan dan pendanaan indikatif sebagai indikasi awal besaran dana yang diperlukan untuk terlaksananya program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2018, meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

- b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- c. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
- d. Kegiatan penyediaan atk
- e. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengadaan
- f. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
- g. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Kegiatan pembangunan gedung kantor
- c. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin.

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

- a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung RPH

5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

- a. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

- a. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

7. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan.

8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

- a. Pengembangan Bibit Produksi Pertanian/Perkebunan
- b. Koordinasi Statistik Pertanian
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat dan Mesin Pertanian
- d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Bangunan Air irigasi pertanian (DAK)
- e. Pembangunan Lokasi Pembenihan Pertanian/perkebunan.
- f. Pemberantasan Hama dan Penyakit Perkebunan
- g. Pembangunan Jalan Pertanian (DAK)

9. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

- a. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
- b. Koordinasi dan perumusan kebijakan penyuluhan pertanian

- c. Pemberian penghargaan bagi pelaku pertanian berprestasi
- d. Penyusunan program penyuluhan

10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- a. Rehabilitas kolam BBI Mogolaing
- b. Pengembangan bibit ikan unggul
- c. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
- d. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Hias
- e. Pembuatan Kolam Percontohan.

11. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

- a. Penyediaan dan rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu (Renja SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2017 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu dikerjakan secara fokus dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD yang secara legalitas formal. Secara umum, dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja maupun pencapaian Renstra pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan, menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, maka pada tahun 2018 direncanakan akan dilaksanakan 34 kegiatan dari 11 program utama dengan jumlah dana sebesar **Rp.5.232.752.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).**

Dengan tersusunnya Renja – SKPD dapat dijadikan alat ukur dan evaluasi kinerja selama 1 (satu) tahun, sejauh mana dapat dilaksanakan dan program apa yang belum terlaksanakan yang masih sangat dibutuhkan guna dilaksanakan serta dilanjutkan tahun berikutnya. Selanjutnya, Renja-SKPD Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Kotamobagu Tahun 2018 berdasarkan potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lainnya. Namun, apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dapat dilakukan perubahan sebagaimana amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 285 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 pasal 3 ayat 2, yang meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Kami menyadari Renja – SKPD ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran – saran untuk penyusunan kedepan sangat diharapkan.

KEPALA DPP-KK,

Ir. M. HARDI MOKODOMPIT, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19640430 198903 1 016

LAMPIRAN

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator

Tahun 2014-2018

TERWUJUDNYA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA DI KAWASAN BOLAANG MONGONDOW RAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERDAYA SAING.

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SRPD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur	cakupan jumlah aparatur yang mengikuti bintak, pelatihan dan peningkatan kapasitas lainnya (orang)			4	6		5		6		10		15			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	cakupan peningkatan kapasitas dan sumber daya ASN ()	80	80	31.720.800	80	25.000.000	85	161.400.000	95	810.000.000	95	140.000.000		1.168.120.800
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	cakupan jumlah bimbingan teknis yang diikuti (orang)		6	31.720.800	5	25.000.000	6	85.200.000	54	848.000.000	55	750.000.000		1.539.920.800
			Study Banding Pengelolaan RPH	Cakupan peningkatan pengetahuan pengelolaan RPH (Kali)		0	-	0	-	1	33.225.000	1	50.000.000	0	-		83.225.000
			Studi Banding Pengelolaan Pasar Benih Ikan	Cakupan peningkatan pengetahuan pengelolaan pasar benih ikan (Kali)		0	-	0	-	1	42.975.000	0	-	0	-		42.975.000
			Studi banding aren organik	Cakupan peningkatan pengolahan aren organik (Kali)		0	-	0	-	0	-	1	42.000.000	0	-		42.000.000
			Magang pengolahan kopi	cakupan peningkatan pengolahan kopi (Kali)		0	-	0	-	0	-	1	70.000.000	0	-		70.000.000
Peningkatan kualitas pengolahan dan pemasaran produk pertanian dan perikanan budidaya	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku utama dan pelaku usaha	cakupan jumlah produksi kangkung (ton)			10,8	15,4		19,7		24,5		29,8		33,4			
		cakupan jumlah produksi kedelai (ton)			60	61,5		63		64,5		66		67,9			
		cakupan jumlah produksi kelapa (ton)			825	825		825		825		900		1000			
		cakupan jumlah produksi kemiri (ton)			6	6		7		8		9		10			
		cakupan jumlah produksi kopi (ton)			64	70		90		100		120		200			
		cakupan jumlah produksi nilem (kg)			0	875		900		1125		1130		1500			
		cakupan jumlah produksi padi gabah kering panen (GKP) (ton)			21502,8	22577,9		23706,83		24892,2		26136,8		27443,62			
		cakupan jumlah produksi tomat (ton)			2,8	3,2		3,5		3,9		4,8		5,2			
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	cakupan jumlah hasil produksi pertanian yang dipromosikan ()	0	0	115.318.500	0	119.457.250	0	166.549.000	14	1.226.237.000	0	422.621.000		2.050.182.750

			Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Cakupan jumlah hasil pertanian yang dipromosikan (kali)		2	115.318.500	2	74.257.250	2	72.499.000	6	217.497.000	6	250.121.000		729.692.750
			Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Cakupan jumlah peserta distribusi pemasaran hasil produksi pertanian (Orang)		0	-	0	-	50	46.000.000	50	50.000.000	50	60.000.000		156.000.000
			Penyediaan sarana produksi pertanian	Cakupan jumlah sarana produksi pertanian yang diadakan (Jenis)		0	-	0	-	0	-	7	569.520.000	5	275.000.000		844.520.000
			Pengadaan sarana prasarana alat dan mesin pertanian	Cakupan jumlah alat dan mesin pertanian yang diadakan (Unit)		0	-	0	-	0	-	33	219.220.000	35	225.000.000		444.220.000
			Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan	Cakupan terlaksananya penyuluhan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan (Orang)		0	-	100	45.200.000	50	48.050.000	50	50.000.000	50	53.000.000		196.250.000
			Pembuatan Web Design Informasi Dinas Pertanian	Cakupan sarana informasi yang tersedia (Paket)		0	-	0	-	0	-	1	120.000.000	0	-		120.000.000
	Meningkatnya penerapan teknologi pengolahan produk pertanian dan perikanan budidaya	Jumlah penerapan teknologi pengolahan hasil produk pertanian dan perikanan budidaya (unit)			0	0		0		0		0		0			
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Cakupan jumlah sarana prasarana teknologi pertanian yang diadakan ()	0	0	132.600.000	0	360.800.000	5	458.453.750	2	1.582.900.000	2	458.750.000		2.993.503.750
				terlaksananya pelatihan teknik budidaya tanaman padi sistem jajar legowo ()	0	0		0		0		4		0			
				terlaksananya kegiatan demonstrasi cara pembuatan pupuk cair dekomposer ()	0	0		0		0		1		0			
				terlaksananya penyuluhan teknik budidaya tanaman jagung sistem jajar legowo ()	0	0		0		0		4		0			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Cakupan jumlah sarana prasarana teknologi pertanian yang diadakan (Paket)		0	-	0	-	7	197.003.750	9	1.252.000.000	8	1.000.000.000		2.449.003.750
			Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Cakupan penerapan teknologi pertanian/perkebunan (Jenis)		2	66.300.000	3	62.800.000	1	57.250.000	0	-	3	65.000.000		251.350.000
			Kaji terap budidaya padi sawah	Cakupan terlaksananya kaji terap padi sawah (Jenis)		0	-	0	-	1	63.300.000	0	-	2	75.000.000		138.300.000
			Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Cakupan penerapan teknologi pertanian/perkebunan (Jenis/kali)		4	66.300.000	5	298.000.000	0	-	5	160.000.000	0	-		524.300.000
			Demontasi cara pembuatan kompos	Cakupan jumlah pelaksanaan demontasi cara pembuatan kompos (Orang)		0	-	0	-	50	19.000.000	100	40.000.000	50	23.000.000		82.000.000
			Penyuluhan teknik budidaya tanaman padi sawah sistem jajar legowo	Cakupan jumlah pelaku utama yang mengikuti penyuluhan teknik budidaya tanaman padi sistem jajar legowo (Orang)		0	-	0	-	200	45.500.000	400	50.000.000	400	57.000.000		152.500.000
			Penyuluhan teknik budidaya tanaman jagung sistem jajar legowo	Cakupan jumlah pelaku utama yang mengikuti penyuluhan teknik budidaya tanaman jagung sistem jajar legowo (Orang)		0	-	0	-	400	65.500.000	400	70.000.000	400	75.000.000		210.500.000

[illegible]

			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	terlaksananya kegiatan penyuluhan penerapan kawin suntik (IB) ()	0	0	-	0	-	0	-	1	37,000,000	1	-	37,000,000
			Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	Cakupan jumlah petugas yang mengikuti pelatihan penyuluhan penerapan kawin suntik (IB) (orang)		0	-	0	-	0	-	35	37,000,000	35	37,000,000	74,000,000
peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur	meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur (%)			60	90	-	90	-	90	-	90		90		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur ()	60	90	1,055,963,815	90	564,960,720	90	258,901,000	90	660,000,000	90	585,000,000	3,124,825,535
			pengadaan perlengkapan gedung kantor	cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor (unit)		114	335,955,300	18	25,600,000	6	24,000,000	6	40,000,000	6	60,000,000	485,555,300
			pembangunan gedung kantor	cakupan jumlah gedung kantor yang dibangun (paket)		1	363,679,100	1	57,700,000	0	-	3	300,000,000	1	195,000,000	916,379,100
			Pengadaan peralatan gedung kantor	cakupan jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (unit)		93	224,735,315	52	313,905,720	5	76,506,000	8	70,000,000	8	80,000,000	765,147,035
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	cakupan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (bulan)		12	116,094,100	12	148,255,000	12	138,395,000	12	200,000,000	12	225,000,000	824,744,100
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	cakupan jumlah alat dan mesin yang terpelihara (unit)		0	-	20	22,500,000	40	20,000,000	40	50,000,000	60	75,000,000	167,500,000
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	cakupan jumlah kendaraan dinas yang diadakan (unit)		1	15,500,000	0	-	0	-	0	-	0	-	15,500,000
peningkatan pembinaan disiplin aparatur	meningkatnya disiplin aparatur	tingkat kepatuhan aparatur (%)			60	90	-	90	-	90	-	90		90		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kepatuhan aparatur ()	60	90	43,400,000	90	78,585,000	90	90,300,000	90	245,000,000	90	105,000,000	562,285,000
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	cakupan jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan (pasang)		40	43,400,000	40	78,585,000	77	44,275,000	100	60,000,000	100	65,000,000	291,260,000
			Pengadaan pakaian kerja lapangan	cakupan jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan (pasang)		0	-	0	-	10	4,950,000	54	27,000,000	54	30,000,000	61,950,000
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	cakupan jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu (pasang)		0	-	0	-	76	41,075,000	100	120,000,000	100	130,000,000	291,075,000
			pengadaan pakaian sipil resmi	cakupan jumlah pakaian sipil resmi yang diadakan (pasang)		0	-	0	-	0	-	19	38,000,000	19	40,000,000	78,000,000
peningkatan kualitas produk pelayanan aparatur	meningkatnya produk pelayanan aparatur	cakupan tingkat pelayanan administrasi (%)			60	90	-	90	-	90	-	90		90		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan tingkat pelayanan administrasi ()	60	90	784,710,950	90	1,752,763,769	90	1,489,329,950	90	2,210,000,000	90	2,152,000,000	8,388,804,669
			penyediaan jasa surat menyurat	jumlah meterai (lembar)		700	7,200,000	1250	7,200,000	1300	7,800,000	2000	12,000,000	2000	8,000,000	42,200,000
			penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	cakupan waktu penyediaan jasa (bulan)		12	86,310,000	12	113,000,000	12	124,500,000	12	150,000,000	12	160,000,000	633,810,000
			penyediaan jasa administrasi keuangan	cakupan jumlah pengelola keuangan dan tenaga kontrak (orang)		51	322,020,000	29	473,340,000	35	459,720,000	40	750,000,000	40	850,000,000	2,855,080,000
			penyediaan etik	cakupan jumlah etik (jenis)		36	20,960,250	52	79,537,269	37	91,799,950	37	125,000,000	37	150,000,000	467,297,469
			penyediaan barang cetakan dan pengadaan	cakupan jumlah barang cetakan dan pengadaan (lembar)		25706	12,396,500	25352	24,265,500	25100	8,600,000	56250	105,000,000	60135	110,000,000	260,262,000
			penyediaan makanan dan minuman	cakupan jumlah makanan dan minuman rapat (dos)		240	6,000,000	1890	44,700,000	400	13,000,000	500	15,000,000	600	20,000,000	98,700,000

			rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	cakupan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali)		107	327.643.200	293	1.010.721.000	100	776.710.000	100	900.000.000	150	1.200.000.000	4.215.074.200
			penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	cakupan jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan (SKH)		313	2.191.000	0		8	7.200.000	8	3.000.000	8	4.000.000	16.391.000
			Peningkatan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan (Dokumen)	Cakupan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Dokumen)		0		0		0		2	150.000.000	2	150.000.000	300.000.000
Penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian dan perikanan budidaya yang efektif	Terselenggaranya sistem penyuluhan pertanian dan perikanan budidaya yang efektif	jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang diberdayakan (orang)				0	0	0		0		0		0		
		jumlah penyuluh pertanian dan perikanan yang tersedia (orang)				0	0	0		0		0		0		
			Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	cakupan sistim penyuluh perikanan ()		0	0	0	72.000.000	0		0		0		72.000.000
			Kajian sistem penyuluhan perikanan (DAK)	cakupan jumlah sistim penyuluhan perikanan yang dikaji (unit)		0		7	65.454.546	0		0		0		65.454.546
			Kajian sistem penyuluhan perikanan (Pendamping DAK)	cakupan jumlah penyuluhan perikanan yang dikaji (unit)		0		7	6.545.454	0		0		0		6.545.454
			Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	terlaksananya kegiatan penyuluh gapoktan ()		0	0	297.500.000	0	663.000.000	0	458.390.000	8	500.000.000	8	1.918.890.800
				terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan bagi pelaku pertanian yang berprestasi ()		0	0	0		0		1		1		
				terlaksananya penyusunan program penyuluhan ()		0	0	0		0		3		0		
				terlaksananya kegiatan koordinasi dan perumusan kebijakan ()		0	0	0		0		4		4		
				terlaksananya peningkatan kapasitas petugas ()		0	0	0		0		1		1		
			Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Cakupan jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)		150	134.400.000	160	310.000.000	28	85.590.000	39	90.000.000	40	100.000.000	719.990.000
			Kordinasi dan perumusan kebijakan penyuluhan pertanian	Cakupan jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang melakukan koordinasi dalam perumusan kebijakan (Orang)		50	98.100.000	85	166.000.000	85	166.000.000	100	175.000.000	100	180.000.000	785.100.000
			Penyuluhan kepada gapoktan	Cakupan jumlah pelaku utama yang diberdayakan (Orang)		0		0		210	73.000.000	280	85.000.000	300	90.000.000	248.000.000
			Pemberian penghargaan bagi pelaku pertanian berprestasi	Cakupan jumlah pelaku pertanian yang berprestasi (Orang)		0		0		12	24.300.000	9	30.000.000	9	40.000.000	94.300.000
			Pelatihan Partisipatory Rural Appraisal (PRA)	Cakupan jumlah penyuluh dan pelaku utama yang dilatih PRA (Orang)		30	20.000.000	33	35.000.000	45	51.000.000	45	55.000.000	45	60.000.000	221.000.000
			Penyusunan program penyuluhan	Cakupan jumlah penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha yang mengikuti penyusunan program penyuluhan (Orang)		200	45.000.000	825	152.000.000	170	58.500.000	1085	65.000.000	1100	70.000.000	390.500.000
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	cakupan jumlah petani yang mengikuti kegiatan ()		0	0	0		0		2	634.144.875	2		634.144.875

			Peningkatan kemampuan kelembagaan petani	Cakupan kemampuan kelembagaan petanian yang ditingkatkan (Orang)		0		0		0		125	634.144.875	125		634.144.875
Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan budidaya	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian	cakupan jumlah produksi cabe (ton)			58.5	61.3		64.18		67.18		69.75		70.23		
		cakupan jumlah produksi gula aren (ton)			1700	1900		2120		2340		2500		3000		
		cakupan jumlah produksi jagung (ton)			3838	3984		4032		5331		5438		5574		
		cakupan jumlah produksi kakao (ton)			550	580		605		700		725		750		
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	cakupan kasus wabah penyakit ternak ()	2	1	114.225.075	1	666.082.200	0	569.796.050	0	510.000.000	0	150.000.000	2.010.103.325
			Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	cakupan jumlah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (kail)		60	114.225.075	60	208.957.200	60	148.040.050	60	135.000.000	60	150.000.000	756.222.325
			Pembangunan Gedung RPH Mini	Cakupan gedung RPH yang dibangun (Hari kerja)		0		0		120	336.856.000	0		0		336.856.000
			pengadaan perlengkapan RPH mini	cakupan jumlah perlengkapan yang mini yang diadakan (paket)		0		0		0		1	375.000.000	0		375.000.000
			pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (DAK)	cakupan jumlah hewan ternak yang tertangani (paket)		0		1	381.000.000	0		0		0		381.000.000
			pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (pendamping DAK)	cakupan jumlah hewan ternak yang tertangani (paket)		0		1	38.100.000	0		0		0		38.100.000
			perencanaan pembangunan gedung puskesmas	cakupan gedung puskesmas yang dibangun (paket)		0		1	19.600.000	0		0		0		19.600.000
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan gedung puskesmas	cakupan kegiatan yang termonev (orang)		0		40	18.425.000	0		0		0		18.425.000
			Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak (Silva DAK 2014)	cakupan jumlah hewan ternak yang tertangani (Paket)		0		0		0	84.900.000	0		0		84.900.000
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	cakupan jumlah populasi hewan ternak ()	378984	443868	287.705.000	555585	198.000.000	557614	205.900.000	561825	935.294.600	574417	500.000.000	2.126.899.800
			Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	cakupan jumlah bibit ternak yang tersalurkan (kelompok)		4	287.705.000	4	198.000.000	4	205.900.000	10	900.000.000	10	950.000.000	2.541.608.000
			Penyusunan data base potensi peternakan	Cakupan data base potensi peternakan yang disusun (Buku)		0		0		0		20	35.294.800	0		35.294.800
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	cakupan Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan ()	0	10	5.189.693.258	10	1.907.629.609	10	13.806.295.533	10	21.038.125.000	10	7.168.750.000	49.110.493.400
			Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	cakupan jumlah sarana dan prasarana yang disediakan (jenis)		5	1.275.275.000	5	441.140.150	5		5	910.000.000	5	910.000.000	3.536.415.150
			Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	cakupan jumlah bibit unggul yang dikembangkan (pohon)		12000	487.942.450	13500	360.713.000	0		15500	1.375.000.000	17000	1.200.000.000	3.423.855.450
			Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)	cakupan jumlah sarana produksi yang disediakan (unit)		67	2.911.953.564	34	832.000.000	25	6.500.000.000	20	5.750.000.000	20	5.500.000.000	21.493.953.564
			Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (Pend.DAK)	cakupan jumlah sarana produksi pertanian yang disediakan (unit)		67	291.195.356	34	83.200.000	0		0		0		374.398.356
			Perencanaan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	cakupan jumlah sarana prasarana pertanian yang disediakan (paket)		1	92.891.448	4	51.054.800	0		0		0		143.946.248

			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	cakupan jumlah monitoring, evaluasi (orang)		0	-	11	51.817.050	0	-	0	-	0	-	51.817.050	
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	cakupan monitoring dan evaluasi (orang/bulan)		48	-	130.435.440	0	-	0	-	0	-	0	-	130.435.440
			Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (Slip/DAK)	cakupan jumlah sarana produksi pertanian yang diadakan (unit)		0	-	5	87.704.609	0	-	0	-	0	-	87.704.609	
			Koordinasi statistik pertanian	cakupan jumlah statistik pertanian yang dikordinasikan (kali)		0	-	0	-	4	24.128.200	4	75.000.000	4	65.000.000	-	164.128.200
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat dan Mesin Pertanian	cakupan jumlah Sarana dan Prasarana Alat dan Mesin Pertanian yang diadakan (jenis)		0	-	0	-	6	105.000.000	1	205.000.000	2	235.750.000	-	545.750.000
			Pembangunan Jalan Pertanian Kel. Mongkonai Barat	cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (hari kerja)		0	-	0	-	150	898.744.000	0	-	0	-	-	898.744.000
			Pembangunan Jalan Pertanian Kel. Mongondow	cakupan penjng jalan pertanian yang dibangun (hari kerja)		0	-	0	-	150	764.054.000	0	-	0	-	-	764.054.000
			Pembangunan Jalan Pertanian Kel. Poyowa Kecil	cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (hari kerja)		0	-	0	-	150	740.739.000	0	-	0	-	-	740.739.000
			Pembangunan Jalan Pertanian Kel. Motobol Kecil	cakupan penjng jalan pertanian yang dibangun (hari kerja)		0	-	0	-	150	776.272.000	0	-	0	-	-	776.272.000
			Pembangunan Jalan Pertanian Kel. Pobundeyan	cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (hari kerja)		0	-	0	-	150	160.107.000	0	-	0	-	-	160.107.000
			Pembangunan Jalan Pertanian Kel. Kobo Kecil	cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (hari kerja)		0	-	0	-	150	671.028.000	0	-	0	-	-	671.028.000
			Pembangunan Waduk / Embung	cakupan waduk/embung yang dibangun (hari kerja)		0	-	0	-	150	724.734.000	150	750.000.000	150	900.000.000	-	2.374.734.000
			Pembangunan Jalan Pertanian Desa Bungko	cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (hari kerja)		0	-	0	-	150	540.582.000	150	632.500.000	0	-	-	1.173.082.000
			Pembangunan Jalan Pertanian Desa Tabang	cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (hari kerja)		0	-	0	-	150	544.288.000	150	402.500.000	0	-	-	946.788.000
			Pembangunan Jalan Pertanian Kel. Mongkonai	cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (hari kerja)		0	-	0	-	150	572.668.150	150	506.000.000	0	-	-	1.078.668.150
			pembangunan jalan pertanian (DAK)	cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (hari kerja)		0	-	0	-	0	-	150	4.000.000.000	150	4.600.000.000	-	8.600.000.000
			pemberantasan hama dan penyakit perkebunan	cakupan jumlah hama dan penyakit yang diberantas (kali/Desa)		0	-	0	-	0	-	4	150.000.000	4	200.000.000	-	350.000.000
			Pembangunan jalan pertanian Desa Poyowa Besar II	Cakupan penjng jalan pertanian yang dibangun (Hari kerja)		0	-	0	-	150	205.060.000	150	885.500.000	0	-	-	1.090.560.000
			Pembangunan Jalan Pertanian Desa Kopandakan I	Cakupan penjng jalan pertanian yang dibangun (Hari kerja)		0	-	0	-	150	171.783.183	150	575.000.000	0	-	-	746.783.183
			Pembangunan Long Storage	Cakupan long storage yang dibangun (Hari Kerja)		0	-	0	-	0	-	150	750.000.000	0	-	-	750.000.000
			Pembangunan Dam Parit	Cakupan dam parit yang dibangun (hari kerja)		0	-	0	-	0	-	150	250.000.000	0	-	-	250.000.000
			Pembangunan Jl. Pertanian Kel. Upai	Panjang Jalan Pertanian yang dibangun (Hari kerja)		0	-	0	-	150	407.108.000	0	-	0	-	-	407.108.000
			Pembangunan lokasi pembenihan pertanian/perkebunan	Cakupan lokasi pembenihan yang dibangun (unit)		0	-	0	-	0	-	1	945.000.000	0	-	-	945.000.000
			Pembangunan sarana prasarana bangunan air irigasi pertanian (DAK)	Cakupan sarana prasarana bangunan air irigasi pertanian (Hari kerja)		0	-	0	-	0	-	150	1.836.000.000	120	2.000.000.000	-	3.836.000.000
			Monitoring, evluasi dan pelaporan kegiatan DAK 2017	cakupan kegiatan yang dimonev (Kali)		0	-	0	-	0	-	2	150.000.000	2	155.000.000	-	305.000.000

			Sertifikasi Produk Pertanian/Perkebunan	Cakupan tersertifikasinya produk pertanian/perkebunan (komododiti)		0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000		200.000.000
			Pemangunan jalan pertanian Desa Poyowa Besar I	Cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun (Hari kerja)		0	-	0	-	0	-	150	790.625.000	0	-		790.625.000
	Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya																
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	cakupan pengembangan budidaya perikanan ()	0	0	1.120.522.692	0	2.508.969.556	0	7.603.655.000	95	3.689.238.000	95	2.819.267.000		17.741.652.248
				pengembangan ikan hias ()	0	0		0		0		90		0			
				cakupan kelompok pembudidaya ikan ()	0	0		0		0		10		0			
				cakupan produksi hasil budidaya perikanan ()	0	0		0		0		704		0			
			Pengembangan bibit ikan unggul	cakupan jumlah budidaya perikanan yang dikembangkan (orang/ekor)		12	223.275.000	12	297.401.000	13	350.800.000	721600	325.000.000	800000	373.750.000		1.570.226.000
			Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK)	cakupan jumlah pengembangan perikanan yang dibina (paket/kelompok)		21	181.329.000	21	1.663.181.818	2	56.220.000	2	200.000.000	2	260.000.000		2.350.730.818
			Pembinaan dan pengembangan perikanan (Pendamping DAK)	cakupan jumlah pengembangan perikanan yang dikembangkan (paket/ekor)		21	18.132.900	21	166.318.182	0	-	2	10.000.000	2	11.500.000		205.951.082
			Pembinaan dan pengembangan perikanan	cakupan jumlah pengembangan perikanan yang dibina (kelompok/ekor)		72500	158.521.180	5	50.355.000	5	272.500.000	5	362.516.000	5	377.767.000		1.221.659.180
			Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Hias	cakupan jumlah budidaya ikan hias yang dikembangkan (ekor)		0	-	0	-	70	103.500.000	80	100.000.000	90	115.000.000		318.500.000
			Pembangunan Saluran Pemasukan dan Pembuangan Air Poldakan Kecamatan Kotamobagu Selatan	cakupan jumlah saluran pemasukan dan pembuangan air yang dibangun (lokasi)		0	-	0	-	6	829.660.000	7	900.000.000	10	1.150.000.000		2.879.660.000
			Pembangunan Saluran Pemasukan dan Pembuangan Air Poldakan Kecamatan Kotamobagu Timur	cakupan jumlah saluran pemasukan dan pengeluaran air yang dibangun (lokasi)		0	-	0	-	3	335.010.000	2	300.000.000	1	143.750.000		778.760.000
			Pembangunan Saluran Pemasukan dan Pembuangan Air Poldakan Kecamatan Kotamobagu Utara	cakupan jumlah saluran pemasukan dan pembuangan air yang dibangun (lokasi)		0	-	0	-	1	108.560.000	1	125.000.000	2	230.000.000		463.560.000
			Pembangunan Saluran Pemasukan dan Pembuangan Air Poldakan Kecamatan Kotamobagu Barat	cakupan jumlah saluran pemasukan dan pengeluaran air yang dibangun (lokasi)		0	-	0	-	2	245.180.000	1	150.000.000	0	-		395.180.000
			Pembuatan Kolam Percontohan	cakupan jumlah kolam percontohan yang dibuat (lokasi)		0	-	0	-	3	267.020.000	2	260.000.000	2	299.000.000		826.020.000
			Pengembangan / Pembangunan UPR	cakupan jumlah UPR yang dibangun (lokasi)		0	-	0	-	1	89.200.000	2	90.000.000	2	103.500.000		282.700.000
			Pembangunan Pagar BBI Moglaleng	cakupan pagar BBI yang dibangun (hari kerja)		0	-	0	-	150	198.830.000	0	-	0	-		198.830.000
			Rehabilitasi Kolam Air Deras BBI Moglaleng	cakupan jumlah kolam yang direhabilitasi (hari kerja)		0	-	0	-	90	26.500.000	0	-	0	-		26.500.000
			Pembangunan Saluran Pemasukan dan Pembuangan Air Pada BBI Moglaleng	cakupan jumlah saluran pemasukan dan pembuangan yang dibangun (hari kerja)		0	-	0	-	120	651.157.000	0	-	0	-		651.157.000
			Pembangunan Saluran Pemasukan dan Pembuangan Air Pada Lokasi Kolam Petani	cakupan jumlah saluran pemasukan dan pembuangan yang dibangun (lokasi)		0	-	0	-	15	1.595.188.000	0	-	0	-		1.595.188.000
			Pengadaan Mesin Produksi Pakan Ikan	cakupan jumlah mesin produksi ikan yang diadakan (unit)		0	-	0	-	4	200.000.000	0	-	0	-		200.000.000
			Pembangunan UPR	cakupan jumlah UPR yang dibangun (lokasi)		0	-	0	-	3	110.960.000	0	-	0	-		110.960.000

			Pembangunan Kolam Rakyat	cakupan jumlah kolam rakyat yang dibangun (lokasi)		0	-	0	-	9	1.640.460.000	0		0		1.640.460.000
			Rehabilitasi Sumur Bor BBI Mogoleing	cakupan sumur bor BBI yang direhabilitasi (hari kerja)		0	-	0	-	90	152.760.000	0		0		152.760.000
			Rehabilitasi Kolam BBI Mogoleing	cakupan jumlah kolam BBI yang direhabilitasi (hari kerja)		0	-	0	-	90	196.500.000	90	407.130.000	0		603.630.000
			Rehabilitasi Kolam Pasar Benih Ikan Bungko	cakupan jumlah kolam pasar benih ikan yang direhabilitasi (hari kerja)		0	-	0	-	90	91.500.000	90	150.000.000	0		241.500.000
			Rehabilitasi Saluran Inlet dan Outlet Serta Bak Filter Air Pasar Benih Ikan Bungko	cakupan jumlah Inlet dan Outlet serta bak filter air pasar benih ikan yang direhabilitasi (hari kerja/titik)		0	-	0	-	90	32.650.000	10	32.750.000	0		65.400.000
			Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)	cakupan jumlah peningkatan pemasaran hasil perikanan yang diolah (unit)		24	343.077.182	0	-	0		0		0		343.077.182
			Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Pemasaran Hasil Perikanan (Pendamping DAK)	cakupan jumlah peningkatan pemasaran hasil perikanan yang diolah (unit)		24	34.307.718	0	-	0		0		0		34.307.718
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	cakupan kegiatan yang dimonev (paket/orang)		3	100.808.600	23	148.089.000	0		0		0		248.898.600
			Perencanaan pembinaan dan pengembangan perikanan	cakupan jumlah pembinaan dan pengembangan perikanan yang direncanakan (paket)		2	61.070.112	3	95.748.300	0		0		0		156.818.412
			Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Hias	cakupan jumlah produksi pembudidayaan ikan hias yang dikelola (ekor)		0		46	64.110.000	0		0		0		64.110.000
			Pembinaan dan pengembangan perikanan (Silpa DAK)	cakupan jumlah pengembangan perikanan yang dibina (paket)		0		2	21.605.688	0		0		0		21.605.688
			Pembinaan dan pengembangan perikanan (Pendamping Silpa DAK)	cakupan jumlah pengembangan perikanan yang dibina (paket)		0		2	2.160.568	0		0		0		2.160.568
			Penyuluhan pembuatan pakan ikan	Jumlah pelaku utama yang mengikuti penyuluhan pembuatan pakan ikan (Orang)		0		0		120	48.500.000	140	60.000.000	160	65.000.000	174.500.000
			Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Cakupan jumlah kelompok tani yang didampingi (kelompok)		0		0		0		4	91.842.000	0		91.842.000
			Penyuluhan Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan)	Cakupan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina (Orang)		0		0		0		50	50.000.000	0		50.000.000
			Pembangunan Gedung Pengolahan Pakan Ikan	Terbangunnya gedung pengolahan pakan ikan (Unit)		0		0		0		1	75.000.000	0		75.000.000
			Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Perbenihan (DAK)	Cakupan Sarana dan Prasarana Unit Perbenihan (Paket)		0		0		0		0		2	1.000.000.000	1.000.000.000
			Percontohan Budidaya Air Tawar (DAK)	Cakupan Percontohan Budidaya Air Tawar (Paket)		0		0		0		0		9	1.170.000.000	1.170.000.000
TOTAL							9,173,360,090			9,229,708,468		26,038,198,283		37,648,622,975		97,243,277,816

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KOTA KOTAMOBAGU**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2				Pilihan								
2	3			Pertanian								
2	3	22		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		cakupan jumlah populasi hewan ternak	561.825 ekor	885.294.600			574.417 ekor	
2	3	22	0	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	SKPD	cakupan jumlah bibit ternak yang didistribusikan	9 kelompok	850.000.000	-		10 kelompok	950.000.000
2	3	22	0	Penyusunan data base potensi peternakan	SKPD	Cakupan data base potensi peternakan yang disusun	20 Buku	35.294.600	-		0 Buku	0
2	3	21		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		cakupan kasus wabah penyakit ternak	0 kasus	135.000.000			0 kasus	
2	3	21	0	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	SKPD	cakupan jumlah pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	60 kali	135.000.000	-		60 kali	150.000.000
2	3	23		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		cakupan sarana dan prasarana pendukung RPH; sarana dan prasarana pasar ternak	30 %:1 unit	1.700.100.000			0 %:0 unit	
2	3	23	0	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung RPH	SKPD	Cakupan sarana dan prasarana pendukung RPH yang disediakan	1 paket	950.100.000	-		0 paket	0

2	3	23	0	pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	SKPD	Tersedianya sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	1 paket	750,000,000	-		0 paket	0
2	3	24		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		terlaksananya kegiatan penyuluhan penerapan kawin suntik (IB)	1 kali	37,000,000			1 kali	
2	3	24	0	Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna	SKPD	Cakupan teknologi peternakan tepat guna yang diterapkan	2 kali	37,000,000	-		0 kali	0
2	3	17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		cakupan jumlah hasil produksi pertanian yang dipromosikan	14 produk	217,497,000			0 produk	
2	3	17	0	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	SKPD	cakupan jumlah hasil pertanian yang dipromosikan	6 kali	217,497,000	-		6 kali	250,121,000
2	3	18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		cakupan jumlah sarana prasarana teknologi pertanian yang diadakan; terlaksananya pelatihan teknik budidaya tanaman padi sistim jajar legowo; terlaksananya kegiatan demonstrasi cara pembuatan pupuk cair dekomposer; terlaksananya penyuluhan teknik budidaya tanaman jagung sistim jajar legowo	2 Unit;4 kali;1 kali;4 kali	290,900,000			2 Unit;0 kali;0 kali;0 kali	

2	3	18	0	Penyuluhan teknik budidaya tanaman jagung sistem jajar legowo	SKPD	Cakupan jumlah pelaku utama yang mengikuti penyuluhan teknik budidaya tanaman jagung sistem jajar legowo	400 Orang	70,000,000	-		0 Orang	75,000,000
2	3	18	0	Penyuluhan teknik budidaya tanaman padi sawah sistem jajar legowo	SKPD	Cakupan jumlah pelaku utama yang mengikuti penyuluhan teknik budidaya tanaman padi sawah sistem jajar legowo	200 Orang	50,000,000	-		0 Orang	57,000,000
2	3	18	0	Demonstrasi cara pembuatan pupuk pelengkap cair dan dekomposer	SKPD	Cakupan jumlah pelaku utama yang mengikuti demonstrasi cara pembuatan pupuk pelengkap cair dan dekomposer	50 Orang	10,900,000	-		0 Orang	10,900,000
2	3	18	0	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	SKPD	Cakupan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	5 Jenis/kali	160,000,000	-		0 Jenis/kali	0
2	3	19		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		cakupan Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	10%	5,011,500,000			10%	
2	3	19	0	Pembangunan sarana prasarana bangunan air irigasi pertanian (DAK)	SKPD	Cakupan sarana prasarana bangunan air irigasi pertanian	120 Hari kerja	1,836,000,000	-		0 Hari kerja	2,000,000,000
2	3	19	0	Pembangunan Jalan Pertanian Desa Kopandakan I	SKPD	Cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun	150 Hari kerja	575,000,000	-		0 Hari kerja	0
2	3	19	0	pemberantasan hama dan penyakit perkebunan	SKPD	cakupan jumlah hama dan penyakit yang diberantas	4 kali	150,000,000	-		4 kali	200,000,000
2	3	19	0	Pembangunan lokasi perbenihan pertanian/perkebunan	SKPD	Cakupan lokasi pembenihan yang dibangun	1 unit	945,000,000	-		0 unit	0
2	3	19	0	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	SKPD	cakupan jumlah bibit unggul yang dikembangkan	17,000 pohon	500,000,000	-		16,500 pohon	1,300,000,000

2	3	19	0	Pembangunan jalan pertanian Desa Poyowa Besar II	SKPD	Cakupan panjang jalan pertanian yang dibangun	150 Hari kerja	885,500,000	-		0 Hari kerja	0
2	3	19	0	Koordinasi statistik pertanian	SKPD	cakupan jumlah statistik pertanian yang dikoordinasikan	4 kali	20,000,000	-		4 kali	23,000,000
2	3	19	0	Sertifikasi Produk Pertanian/Perkebunan	SKPD	Cakupan tersertifikasinya produk pertanian/perkebunan	1 komoditi	100,000,000	-		0 komoditi	100,000,000
2	3	20		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		terlaksananya kegiatan penyuluh gapoktan; terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan bagi pelaku pertanian yang berprestasi; terlaksananya penyusunan program penyuluhan; terlaksananya kegiatan koordinasi daan perumusan kebijakan; terlaksananya peningkatan kapasitas petugas	8 kali;1 kali;3 kali;4 kali;1 kali	445,000,000			8 kali;1 kali;0 kali;4 kali;1 kali	
2	3	20	0	Penyusunan program penyuluhan	SKPD	Cakupan jumlah penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha yang mengikuti penyusunan program penyuluhan	200 Orang	65,000,000	-		0 Orang	70,000,000
2	3	20	0	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	SKPD	Cakupan jumlah penyuluh yang mengikuti peningkatan kapasitas	30 Orang	90,000,000	-		0 Orang	100,000,000

2	3	20	0	Penyuluhan kepada gapoktan	SKPD	Cakupan jumlah pelaku utama yang diberdayakan	220 Orang	85,000,000	-		0 Orang	90,000,000
2	3	20	0	Pemberian penghargaan bagi pelaku pertanian berprestasi	SKPD	Cakupan jumlah pelaku pertanian yang berprestasi	12 Orang	30,000,000	-		0 Orang	40,000,000
2	3	20	0	Koordinasi dan perumusan kebijakan penyuluhan pertanian	SKPD	Cakupan Jumlah Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dalam perumusan kebijakan	85 Orang	175,000,000	-		0 Orang	180,000,000
2	3	15		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		cakupan jumlah petani yang mengikuti kegiatan	2 kali	634,144,875			2 kali	
2	3	15	0	Peningkatan kemampuan kelembagaan petani	SKPD	Cakupan kemampuan kelembagaan petanian yang ditingkatkan	100 Orang	634,144,875	-		0 Orang	0
2	1			Kelautan dan Perikanan								
2	1	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan		cakupan pengembangan budidaya perikanan; pengembangan ikan hias; cakupan kelompok pembudidaya ikan; cakupan produksi hasil budidaya perikanan	95 %;90 %;10 kelompok;704 ton	818,342,000			95 %;0 %;0 kelompok;0 ton	
2	1	20	0	Rehabilitasi Kolam Pasar Benih Ikan Bungko	SKPD	cakupan jumlah kolam pasar benih ikan yang direhabilitas	1 buah	144,000,000	-		2 buah	0
2	1	20	0	Penyuluhan Pokdakan (kelompok pembudidaya ikan)	SKPD	Cakupan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang dibina	28 Orang	50,000,000	-		0 Orang	0
2	1	20	0	Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Hias	SKPD	cakupan jumlah budidaya ikan hias yang dikembangkan	90 ekor	100,000,000	-		90 ekor	125,000,000

2	1	20	0	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	SKPD	Cakupan jumlah kelompok tani yang didampingi	4 kelompok	91.842,000	-		0 kelompok	0
2	1	20	0	Rehabilitasi Saluran Inlet dan Outlet Serta Bak Filter Air Pasar Benih Ikan Bungko	SKPD	penerangan disetiap persimpangan	10 titik	32.500,000	-		15 titik	0
2	1	20	0	Pengembangan bibit ikan unggul	SKPD	cakupan budidaya perikanan yang dikembangkan	721.600 ekor	325.000,000	-		800.000 ekor	375.000,000
2	1	20	0	Pembangunan Gedung Pengolahan Pakan Ikan	SKPD	Terbangunnya gedung pengolahan pakan ikan	1 Unit	75.000,000	-		0 Unit	0
2	1	23		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		cakupan pengelolaan dan pemasaran produksi hasil perikanan; cakupan budidaya ikan hias; cakupan pengembangan budidaya perikanan	90 % 90 % 90 %	125.000,000			90 % 90 % 90 %	
2	1	23	0	Pemasangan Terali di Saluran Pasar Benih Ikan Bungko	SKPD	Cakupan Terali di Saluran Pasar Benih Ikan Bungko yang dipasang	1 Paket	35.000,000	-		0 Paket	0
2	1	23	0	Peningkatan Keterampilan Pengolah Hasil Perikanan	SKPD	Cakupan keterampilan pengolahan hasil perikanan yang ditingkatkan	1 Pelatihan	90.000,000	-		0 Pelatihan	0
4												
4	0			Urusan operasional rutin perkantoran								
4	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		cakupan peningkatan kapasitas dan sumber daya ASN	95%	47.500,000			95%	
4	0	5	0	Study Banding Pengelolaan RPH	SKPD	Cakupan peningkatan pengetahuan pengelolaan RPH	1 Kali	47.500,000	-		0 Kali	0

4	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		cakupan tingkat pelayanan administrasi	90%	1.771.000.000			90%	
4	0	1	0	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SKPD	cakupan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 kali	900.000.000	-		150 kali	1.250.000.000
4	0	1	0	Penyediaan ATK	SKPD	Cakupan Jumlah ATK	37 jenis	100.000.000	-		40 jenis	125.000.000
4	0	1	0	penyediaan jasa surat menyurat	SKPD	jumlah meterai	1.300 lembar	8.000.000	-		2.000 lembar	9.000.000
4	0	1	0	penyediaan makanan dan minuman	SKPD	cakupan jumlah makanan dan minuman rapat	500 dos	15.000.000	-		700 dos	30.000.000
4	0	1	0	penyediaan jasa administrasi keuangan	SKPD	cakupan jumlah pengelola keuangan dan tenaga kontrak	40 orang	500.000.000	-		45 orang	650.000.000
4	0	1	0	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	cakupan jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	313 eksemplar	3.000.000	-		313 eksemplar	4.000.000
4	0	1	0	penyediaan barang cetakan dan pengadaan	SKPD	cakupan jumlah barang cetakan dan pengadaan	55 250 lembar	105.000.000	-		65 250 lembar	145.000.000
4	0	1	0	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	SKPD	cakupan waktu penyediaan jasa	12 bulan	140.000.000	-		12 bulan	180.000.000
4	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	520.000.000			90%	
4	0	2	0	pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	cakupan jumlah perlengkapan gedung kantor	6 unit	40.000.000	-		6 unit	65.000.000
4	0	2	0	pembangunan gedung kantor	SKPD	cakupan jumlah gedung kantor yang dibangun	2 paket	200.000.000	-		3 paket	250.000.000
4	0	2	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	cakupan jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	8 unit	70.000.000	-		8 unit	80.000.000
4	0	2	0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	SKPD	cakupan jumlah alat dan mesin yang terpelihara	40 unit	50.000.000	-		60 unit	75.000.000
4	0	2	0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	cakupan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 bulan	160.000.000	-		12 bulan	175.000.000

4	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		tingkat kepatuhan aparatur	90%	27,000,000			90%	
4	0	3	0	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	cakupan jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	54 pasang	27,000,000	-		0 pasang	30,000,000
						TOTAL		12,665,278,475				9,164,021,000